

JARINGAN DUKUNGAN BARU UNTUK PAPUA BARAT DILUNCURKAN DI PARLEMEN EROPA

12 Mei 2022



Jaringan baru anggota parlemen yang mendukung Papua Barat diluncurkan hari ini (12 Mei 2022) di Parlemen Eropa di Brussel. Pada pertemuan dan konferensi pers, Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) mengumumkan pembentukan cabang baru mereka di Uni Eropa.

Pertemuan bertajuk ‘Papua Barat: Hak Asasi Manusia, Penentuan Nasib Sendiri, dan Visi Negara Hijau’ ini dipandu oleh Carles Puigdemont, Anggota Parlemen Eropa, mantan Presiden Pemerintah Katalonia, dan Fernando Barrena, Anggota Parlemen Eropa dari Negara Basque. Presiden Sementara Benny Wenda menyampaikan pidato di hadapan para peserta, didampingi oleh Ralph Regenvanu (mantan Menteri Luar Negeri dan Pemimpin Oposisi Vanuatu), Alex Sobel, Anggota Parlemen Inggris, dan Jojo Mehta (Direktur Eksekutif Stop Ecocide International).

Dalam pertemuan yang penuh sesak ini, para peserta mendengarkan perkembangan Pemerintahan Sementara ULMWP, dan para anggota parlemen berjanji untuk terus mendorong kunjungan yang sudah lama tertunda dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat. Pertemuan ini juga mendesak Uni Eropa untuk menghentikan negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dengan Indonesia hingga pendudukan Papua Barat ditangani.

Demonstrasi dan pertemuan berlangsung di seluruh Papua Barat selama dua hari terakhir untuk mendukung pertemuan tersebut.

Presiden Carles Puigdemont mengatakan: "Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Sejak itu, Papua Barat hidup di bawah rezim penindasan ekstrem yang bisa dianggap sebagai genosida. Kami ingin memberi tekanan pada Uni Eropa untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Ini adalah utang moral dan historis yang dimiliki orang Eropa terhadap rakyat Papua Barat."

Pernando Barrena, Anggota Parlemen Eropa, mengatakan: "Situasi saat ini di Papua Barat dapat digambarkan sebagai darurat kemanusiaan, dengan puluhan ribu orang terlantar secara internal, pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus, dan penolakan permanen untuk membiarkan instrumen hak asasi manusia internasional masuk ke negara tersebut."

Presiden Sementara Wenda mengatakan: "Kami menuntut agar Uni Eropa menghentikan pendanaan dan dukungan terhadap kelanjutan 'Otonomi Khusus' dan pemisahan lebih lanjut Papua Barat. Indonesia telah menyalahgunakan dana Uni Eropa untuk membantu militernya membunuh rakyat saya. Semua investasi Uni Eropa di Papua Barat harus dihentikan sampai Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke wilayah tersebut."

Kontak: press@ulmwp.org



